Ekonomis: Journal of Economics and Business
Vol 8, No 1 (2024): Maret, 512-520
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122
Webite: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com
ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1528

Blue Economy dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Indonesia

Tria Apriliana*, Andina Nur Fathonah, Muhammad Ali
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama, Bandung
*Correspondence: tria.apriliana@widyatama.ac.id

ABSTRAK
Potensi pemanfaatan sektor maritim Indonesia sangat besar, namun belum termanfaatkan dengan optimal. Dalam upaya pengembangan sektor maritim, Indonesia menghadapi tantangan untuk dapat meningkatkan perekonomian di sektor maritim, namun juga haru menjaga kelestarian yang ada, yang tertuang dalam konsep blue economy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut terhadap kemiskinan melalui volume produksi perikanan tangkap dan nilai produksi perikanan tangkap di Indonesia. Penelitian ini meneliti 34 provinsi di Indonesia periode tahun 2021 dengan menggunakan teknik analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah nelayan berpengaruh signfikan terhadap volume produksi perikanan tangkap, jumlah nelayan tidak berpengaruh signfikan terhadap nilai produksi perikanan tangkap, jumlah kapal perikanan tangkap berpengaruh signfikan terhadap volume produksi perikanan tangkap, jumlah kapal perikanan tangkap tidak berpengaruh signfikan terhadap nilai produksi perikanan tangkap, volume produksi perikanan tangkap berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi perikanan tangkap, Nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, dan nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: blue economy, kemiskinan, nelayan, PDRB

ABSTRACT
The potential for utilization of the Indonesian maritime sector is very large, but it has not been utilized optimally. In efforts to develop the maritime sector, Indonesia faces the challenge of improving the economy in the maritime sector, but also has to maintain existing sustainability, which is stated in the blue economy concept. This research aims to determine the effect of the number of fishermen and the number of marine capture fishing vessels on poverty through the volume of capture fisheries production and the value of capture fisheries production in Indonesia. This research examines 34 provinces in Indonesia for the 2021 period using path analysis techniques. The results of the research show that the number of fishermen has a significant influence on the volume of capture fisheries production, the number of fishermen has no significant influence on the value of capture fisheries production, the number of capture fisheries vessels has a significant influence on the volume of capture fisheries production, the number of capture fisheries vessels has no significant influence on the value of capture fisheries production, the volume of capture fisheries production has a significant effect on the production value of capture fisheries, the production value of capture fisheries does not have a significant effect on gross regional domestic product, and the production value of capture fisheries does not have a significant effect on environmental quality in Indonesia.

Keywords: *blue economy, fishermen, gross regional domestic product, poverty*

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan kesejahteraan di Indonesia. Terhitung sejak Maret 2013, jumlah penduduk miskin mencapai 28,71 juta jiwa, dan pada 10 tahun kemudian, pada Maret 2023 masih berada pada jumlah 25,90 juta jiwa. Sementara itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km2 yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar (Pratama, 2020). Namun demikian, kontribusi dari sektor perikanan di Indonesia hanya 2,58% terhadap PDB RI pada 2022 (BPS, 2022a). Kemiskinan di

antara nelayan menjadi perhatian serius karena kompleksitas faktor yang menyebabkannya. Penelitian ini didasari oleh studi sebelumnya tentang kemiskinan nelayan, yang melalui analisis menyeluruh, terbukti sebagai gambaran dari masalah sosial yang timbul dari beragam faktor internal dan eksternal yang kompleks (Wijaya & Fauzie, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan yang sangat berpotensi belum terkelola sehingga tidak memberi kinerja yang optimal terhadap perekonomian. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pembangunan di Indonesia sebaiknya mengarah pada konsep blue economy. Blue economy atau ekonomi biru merupakan gagasan baru dalam pembangunan yang berorientasi pada sektor kelautan sebagai focus utama (Banu, 2020; Prayuda, 2019; Silooy, 2017). Terkait dengan hal tersebut, pada 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun strategi penerapan ekonomi biru (blue economy) guna memulihkan kesehatan laut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Untuk mewujudkan ekonomi biru tersebut, KKP percaya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) tangguh dan bertalenta global memegang peran penting. Oleh karena itu, KKP terus mendorong peningkatan kapasitas SDM unggul di berbagai daerah (KKP, 2022b). Blue economy sendiri berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan saat ini tidak menghasilkan dampak negative terhadap generasi mendatang, agar generasi mendatang masih dapat merasakan kekayaan alam Indonesia yang kaya akan hasil alam, baik tanah maupun lautnya (Fabiola, 2022).

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan berbasis wilayah maritim sebagai salah satu tujuan negara poros maritim dunia, maka pembangunan terhadap wilayah pesisir perbatasan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan maritim tersebut. Dengan Poros Maritim dunia, Indonesia akan menjadi negara dengan identitas maritim yang kuat. Pemberdayaan seluruh masyarakat pesisir dalam sektor poros maritim dapat menjadi faktor pemerataan ekonomi Indonesia. Lekat dengan budaya orientasi darat membuat masyarakat tidak mengetahui isu-isu maritim. Padahal pemberdayaan di sektor kemaritiman dapat menjadi instrumen bagi Indonesia untuk memiliki posisi yang lebih unggul dan berpengaruh terdapat pasar ekonomi regional maupun internasional. Oleh karena itu pengembangan konsep berkelanjutan yang didasarkan pada konsep Blue Economy tentu saja dapat mendukung keberhasilan pembangunan yang berbasis pada eksplorasi dan bukan eksploitasi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Prayuda, 2019).

Pada 2021, terdapat 1.087 desa tepi laut yang mengalami terjadinya pencemaran air, 195 desa mengalami pencemaran tanah, dan 716 desa mengalami pencemaran udara. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018, di mana terdapat 1926 desan yang mengalami pencemaran air, kemudian 296 desa mengalami pencemaran tanah, dan 975 desa mengalami pencemaran udara (BPS, 2022b). Konsep blue economy menekankan adanya peningkatan kesejahteraan dari kegiatan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan data, nilai produksi ikan di Indonesia terus mengalami peningkatan di mana pada 2010 nilai produksinya sebesar Rp64.549.401.000.000, dan pada 2021 menjadi sebesar Rp194.856.953.000.000 (KKP 2022b). Begitu juga dengan tingkat volume produksi perikanan tangkap yang semakin meningkat, di mana pada 2010 volume produksi perikanan tangkap tercatat sekitar 5 juta ton per tahun, dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 7,2 juta ton per tahun (KKP, 2022a). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup di desa pesisir, seiring dengan adanya peningkatan volume produksi dan nilai produksi perikanan tangkap.

Namun demikian, yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap. Sebab dengan semakin meningkatnya volume produksi dan nilai produksi perikanan tangkap, akan meningkatkan minat seseorang untuk terlibat dalam kegiatan menangkap ikan, sehingga terjadi peningkatan jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap. Hal ini dapat memicu terjadinya penurunan produktivitas. Tingginya jumlah kapal dan jumlah nelayan juga akan memicu penggunaan bahan bakar sehingga akan menekan kualitas lingkungan yang ada, dan hal tersebut akan mencemari lingkungan, yang akan berakibat pada turunnya volume produksi perikanan tangkap. Nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir (Fujiani, 2022). Hasil-hasil penelitian tentang aspek sosial ekonomi masyarakat nelayan selama ini

telah menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka adalah nelayan buruh atau nelayan kecil yang tinggal dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas. Kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari sangat terbatas. Bagi masyarakat nelayan, di antara berbagai kebutuhan esensial, kebutuhan akan pangan merupakan hal yang paling krusial. Memastikan pasokan pangan yang memadai setiap harinya memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup mereka (Anwar & Wahyuni, 2019; Intyas et al., 2022; Zulkifli et al., 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut terhadap kemiskinan melalui volume produksi perikanan tangkap dan nilai produksi perikanan tangkap di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian statistik deskriptif dan statistik verifikatif dengan menggunakan *path analysis*. Berdasarkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menguji pengaruh jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut terhadap PDRB dan kemiskinan melalui volume produksi perikanan tangkap dan nilai produksi perikanan tangkap, maka dilakukanlah analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Hubungan struktural antara keenam variabel dapat diformulasikan kedalam persamaan struktural. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka struktural dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$\text{LogVPPT} = \rho_{1.1}\text{Log JN} + \rho_{1.2}\text{Log JKPTL} + \varepsilon_1$; $\text{LogNPPT} = \rho_{1.2}\text{Log JN} + \rho_{2.2}\text{Log JKPTL} + \varepsilon_2$; $\text{LogNPPT} = \rho_3\text{Log VPPT} + \varepsilon_2$; $\text{LogPDRB} = \rho_{4.1}\text{Log NPPT} + \varepsilon_3$; $\text{Kemiskinan} = \rho_{4.2}\text{Log NPPT} + \varepsilon_4$

Dimana: Log JN = logaritma variabel jumlah nelayan; Log JKPTL = logaritma variabel jumlah kapal perikanan tangkap laut; Log VPPT = logaritma variabel volume produksi perikanan tangkap; Log NPPT = logaritma variabel nilai produksi perikanan tangkap; Log PDRB = logaritma variabel PDRB' ρ = koefisien jalur; ε = galat

HASIL

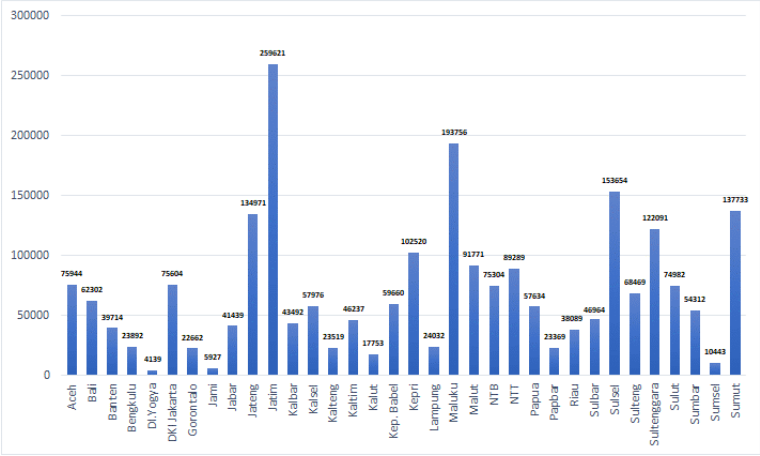

Sumber: data olahan

Gambar 1
Jumlah Nelayan (Orang) pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021

Gambar 1 mengenai variabel jumlah nelayan, diketahui bahwa provinsi yang jumlah nelayannya terbanyak adalah provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 259.621 orang, sedangkan provinsi yang jumlah nelayannya paling sedikit adalah DI. Yogyakarta yaitu hanya sebanyak 4.139 orang. Rata-rata jumlah nelayan pada 34 provinsi di Indonesia sebanyak 69.390 orang dengan nilai standar deviasi sebesar 55.758
orang.

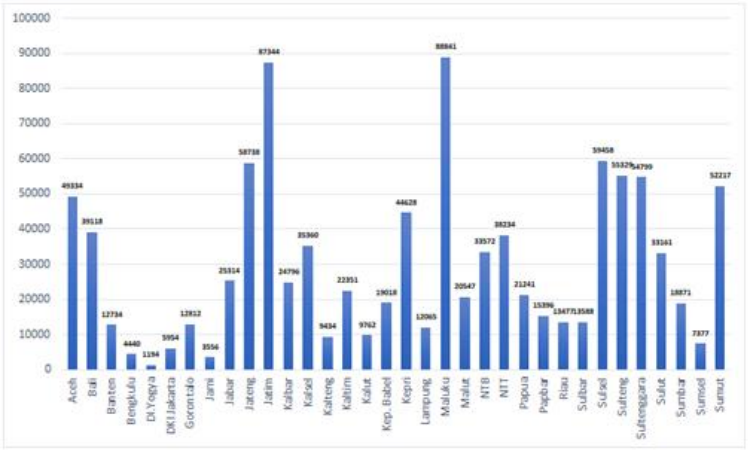

Sumber: data olahan

Gambar 2
Jumlah Kapal Perikanan Tangkap Laut (Unit) pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021

Gambar 2 mengenai variabel jumlah kapal perikanan tangkap laut, diketahui bahwa provinsi yang jumlah kapal perikanan tangkap lautnya terbanyak adalah provinsi Maluku yaitu sebanyak 88.841 unit, sedangkan provinsi yang jumlah kapal perikanan tangkap lautnya paling sedikit adalah DI. Yogyakarta yaitu hanya sebanyak 1.194 unit. Rata-rata jumlah kapal perikanan tangkap laut pada 34 provinsi di Indonesia sebanyak 29.531 unit dengan nilai standar deviasi sebesar 22.877 unit.

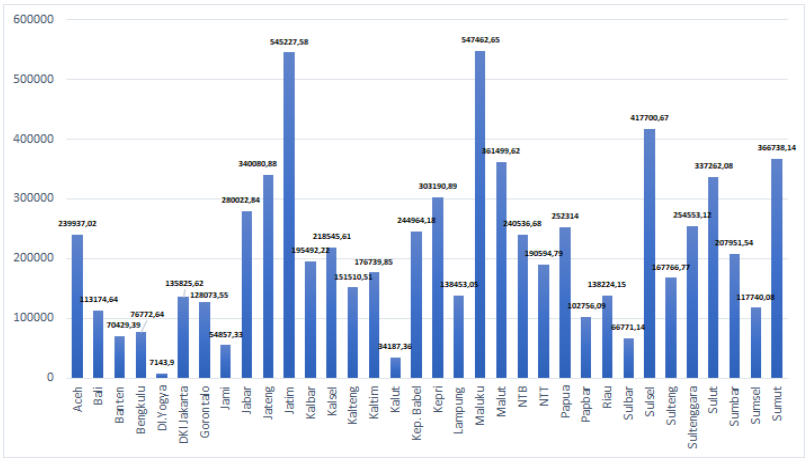

Sumber: data olahan

Gambar 3
Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton) pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021

Gambar 3 mengenai variabel volume produksi perikanan tangkap, diketahui bahwa provinsi yang volume produksi perikanan tangkapnya terbanyak adalah provinsi Maluku yaitu sebanyak 547.463 ton, sedangkan provinsi yang volume produksi perikanan tangkapnya paling sedikit adalah DI. Yogyakarta yaitu hanya sebanyak 7.144 ton. Rata-rata volume produksi perikanan tangkap pada 34 provinsi di Indonesia sebanyak 212.485,31 ton dengan nilai standar deviasi sebesar 132.911,46 ton.

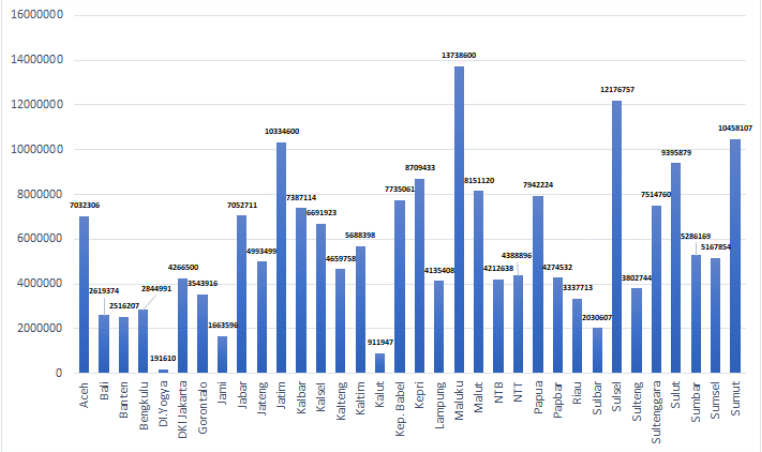

Sumber: data olahan

Gambar 4
Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Juta Rupiah) pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021

Gambar 4 mengenai variabel nilai produksi perikanan tangkap, diketahui bahwa provinsi yang nilai produksi perikanan tangkapnya terbanyak adalah provinsi Maluku yaitu mencapai 13.738.600 juta rupiah, sedangkan provinsi yang nilai produksi perikanan tangkapnya paling sedikit adalah DI. Yogyakarta yaitu hanya sebesar 191.610 juta rupiah. Rata-rata nilai produksi perikanan tangkap pada 34 provinsi di Indonesia sebesar 5.731.086,82 juta rupiah dengan nilai standar deviasi sebesar 3.192.836,14 juta rupiah. Sedangkan Gambar 5 mengenai variabel PDRB, diketahui bahwa provinsi yang memiliki PDRB tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu mencapai 1.856.076 milyar rupiah, sedangkan provinsi yang PDRB terendah adalah provinsi Gorontalo yaitu hanya sebesar 29.110 milyar rupiah. Rata-rata PDRB pada 34 provinsi di Indonesia sebesar 330.567,46 milyar rupiah dengan nilai standar deviasi sebesar 472.084,38 milyar rupiah.

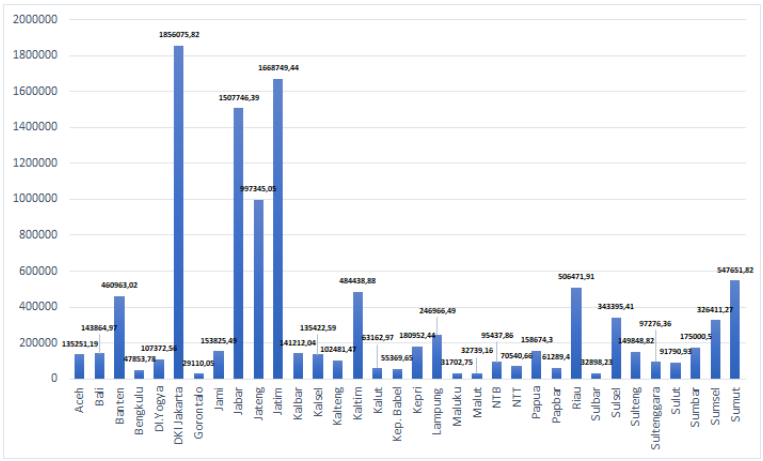

Sumber: data olahan

Gambar 5
PDRB (Milyar Rupiah) pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021

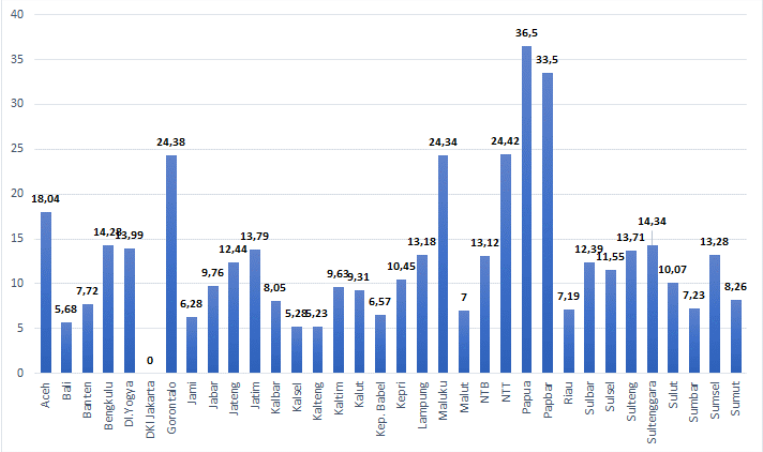

Sumber: data olahan

Gambar 6
Persentase Penduduk Miskin di Desa pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021

Gambar 6 mengenai variabel penduduk miskin di desa, diketahui bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin di desa tertinggi adalah provinsi Papua yaitu mencapai 36,5 persen, sedangkan provinsi yang persentase penduduk miskin di desa terendah (nol) adalah DKI Jakarta. Rata-rata persentase penduduk miskin di desa pada 34 provinsi di Indonesia sebesar 12,7 persen dengan nilai standar deviasi sebesar 7,9 persen.

Hasil Uji Normalitas Data

Dengan mengunakan bantuan aplikasi program SPSS 27, diperoleh nilai *Sig.* uji normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* pada masing-masing variabel. Nilai *p-value* (Sig.) variabel jumlah nelayan sebesar 0,200, variabel jumlah kapal perikanan tangkap laut sebesar 0,200, variabel volume produksi perikanan tangkap sebesar 0,200, variabel nilai produksi perikanan tangkap sebesar 0,067, variabel PDRB sebesar 0,141, dan variabel kemiskinan sebesar 0,051. Dikarenakan nilai *p-value* masing-masing variabel tersebut lebih besar dari *alpha* 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data variabel penelitian berdistribusi normal.

Persamaan Jalur

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien jalur pada Gambar 7, maka dapat dibentuk hasil persamaan jalur sebagai berikut: LogVPPT = 0,467 Log JN + 0,427 Log JKPTL; LogNPPT = -0,145 Log JN – 0,089 Log JKPTL; Log NPPT = 1,162 Log VPPT; Log PDRB = 0,170 Log NPPT; dan Kemiskinan = 0,091 Log NPPT. Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- $\rho_{1.1}$ = 0,467; artinya jika jumlah nelayan semakin meningkat sebesar satu satuan maka volume produksi perikanan tangkap akan mengalami peningkatan pula sebesar 0,467 satuan.
- $\rho_{1.2}$ = 0,427; artinya jika jumlah kapal perikanan tangkap laut semakin meningkat sebesar satu satuan maka volume produksi perikanan tangkap akan mengalami peningkatan pula sebesar 0,427 satuan.
- $\rho_{2.1}$ = -0,145; artinya jika jumlah nelayan semakin meningkat sebesar satu satuan maka nilai produksi perikanan tangkap akan mengalami penurunan sebesar 0,145 satuan.
- $\rho_{2.2}$ = -0,089; artinya jika jumlah kapal perikanan tangkap laut semakin meningkat sebesar satu satuan maka nilai produksi perikanan tangkap akan mengalami penurunan sebesar 0,089 satuan.
- ρ_{3} = 1,162; artinya jika volume produksi perikanan tangkap semakin meningkat sebesar satu satuan maka nilai produksi perikanan tangkap akan mengalami peningkatan pula sebesar 1,162 satuan.
- $\rho_{4.1}$ = 0,170; artinya jika nilai produksi perikanan tangkap semakin meningkat sebesar satu satuan maka PDRB akan mengalami peningkatan pula sebesar 0,170 satuan.
- $\rho_{4.2}$ = 0,091; artinya jika nilai produksi perikanan tangkap semakin meningkat sebesar satu satuan maka kemiskinan akan mengalami peningkatan pula sebesar 0,091 satuan.

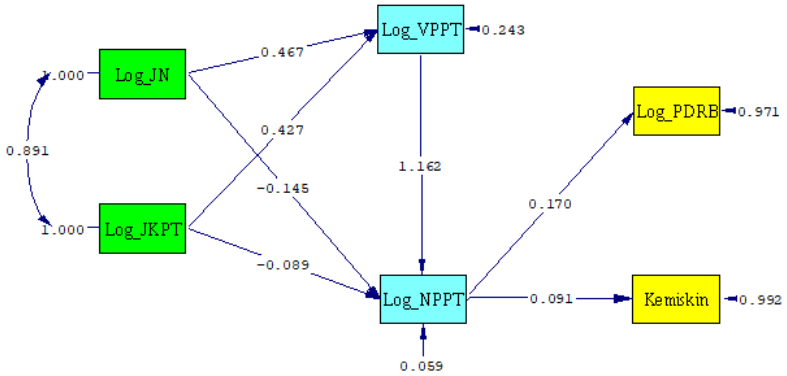

Sumber: data olahan

Gambar 7
Koefisien Jalur

Tabel 1
R-Square

Pengaruh	R-square
Jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut terhadap volume produksi perikanan tangkap	0,757
Jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut terhadap nilai produksi perikanan tangkap	0,941
Jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut terhadap PDRB melalui volume produksi perikanan tangkap dan nilai produksi perikanan tangkap	0,029
Jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut terhadap kemiskinan melalui volume produksi perikanan tangkap dan nilai produksi perikanan tangkap	0,008

Sumber: data olahan

Tabel 1 diketahui bahwa jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut berpengaruh terhadap volume produksi perikanan tangkap sebesar 0,757 atau 75,7%. Jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut berpengaruh terhadap nilai produksi perikanan tangkap sebesar 0,941 atau 94,1%. Jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut berpengaruh terhadap PDRB melalui volume produksi perikanan tangkap dan nilai produksi perikanan tangkap sebesar 0,029 atau 2,9%. Jumlah nelayan dan jumlah kapal perikanan tangkap laut berpengaruh terhadap kemiskinan melalui volume produksi perikanan tangkap dan nilai produksi perikanan tangkap sebesar 0,008 atau 0,8%.

Berdasarkan Gambar 3 dan Tabel 2 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa jumlah nelayan berpengaruh signifikan terhadap volume produksi perikanan tangkap di Indonesia, di mana nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 2,391 lebih besar dari 1,96 atau 2,391 > 1,96 sehingga H_0 ditolak. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi jumlah nelayan, maka akan mendorong volume produksi perikanan tangkap di Indonesia. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa jumlah nelayan tidak berpengaruh signfikan terhadap nilai produksi perikanan tangkap di Indonesia, dimana nilai t-hitung yang diperoleh sebesar -1,382 lebih kecil dari 1,96 atau |-1,382| < 1,96 sehingga H_0 diterima. Dengan kata lain, dengan bertambahnya jumlah nelayan, hal tersebut tidak membuat nilai produksi perikanan tangkap menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan tangkap dapat ditentukan oleh faktor lain, seperti ada tidaknya teknologi yang nelayan manfaatkan, serta iklim dan kondisi lingkungan yang mendukung ketersediaan ikan di perarairan.

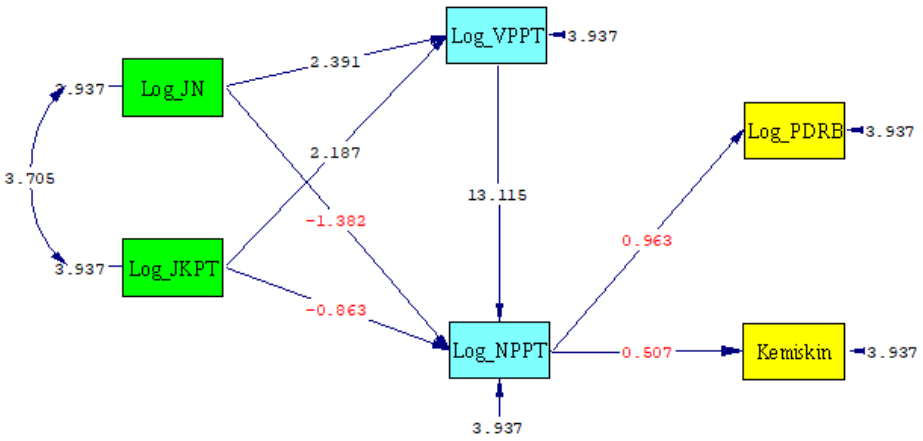

Sumber: data olahan

Gambar 3
t-hitung

Tabel 2
R-Square

Pengaruh	Koefisien Jalur	t-hitung	Keputusan
Jumlah nelayan terhadap volume produksi perikanan tangkap di Indonesia	0,467	2,391	H_0 ditolak
Jumlah nelayan terhadap nilai produksi perikanan tangkap di Indonesia	-0,145	-1,382	H_0 diterima
Jumlah kapal perikanan tangkap terhadap volume produksi perikanan tangkap di Indonesia	0,427	2,187	H_0 ditolak
Jumlah kapal perikanan tangkap terhadap nilai produksi perikanan tangkap di Indonesia	-0,089	-0,863	H_0 diterima
Volume produksi perikanan tangkap terhadap nilai produksi perikanan tangkap di Indonesia	1,162	13,115	H_0 ditolak
Nilai produksi perikanan tangkap terhadap PDRB	0,170	0,963	H_0 diterima
Nilai produksi perikanan tangkap terhadap kualitas lingkungan di Indonesia	0,091	0,507	H_0 diterima

Sumber: data olahan

Selain itu, jumlah kapal perikanan tangkap berpengaruh signfikan terhadap volume produksi perikanan tangkap di Indonesia, dimana nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 2,187 lebih besar dari 1,96 atau 2,187 > 1,96 sehingga H_0 ditolak. Namun demikian jumlah kapal perikanan tangkap tidak berpengaruh signfikan terhadap nilai produksi perikanan tangkap di Indonesia, dimana nilai t-hitung yang diperoleh sebesar -0,863 lebih kecil dari 1,96 atau |-0,863| < 1,96 sehingga H_0 diterima. Hal ini juga dapat tergantung dari teknologi yang digunakan sehingga nelayan dapat menghasilkan ikan yang memiliki nilai lebih tinggi. Namun jika kapal perikanan masih menggunakan teknologi dan cara tradisional, maka nilai produksi perikanan tidak akan terpengaruh secara signifikan oleh penambahan jumlah kapal yang ada.

Terkait dengan volume produksi perikanan tangkap, hasil analisis menujukkan berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi perikanan tangkap di Indonesia, dimana nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 13,115 lebih besar dari 1,96 atau 13,115 > 1,96 sehingga H_0 ditolak. Dengan semakin tingginya volume produksi perikanan tangkap, maka akan mendorong peningkatan nilai produksi. Disamping itu, nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, dimana nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 0,963 lebih kecil dari 1,96 atau 0,963 < 1,96 sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari perikanan tangkap di Indonesia, yang memiliki terirori laut yang sangat luas, tidak memberi peran terhadap peningkatan PDRB. Kemudian, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dimana nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 0,507 lebih kecil dari

1,96 atau 0,507 < 1,96 sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, semakin memperjelas bahwa potensi wilayah laut Indonesia yang luas, tidak memberi kontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah nelayan berpengaruh signfikan terhadap volume produksi perikanan tangkap, jumlah nelayan tidak berpengaruh signfikan terhadap nilai produksi perikanan tangkap, jumlah kapal perikanan tangkap berpengaruh signfikan terhadap volume produksi perikanan tangkap, jumlah kapal perikanan tangkap tidak berpengaruh signfikan terhadap nilai produksi perikanan tangkap, volume produksi perikanan tangkap berpengaruh signifikan terhadap nilai produksi perikanan tangkap, Nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, dan nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Desa. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah memperpanjang masa penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Untuk peneliti selanjutnya dapat dikaji lebih dalam terkait kemiskinan yang terjadi di kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Z., & Wahyuni, W. 2019. Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, *4*(1).

Banu, N. M. 2020. Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *22*(1).

BPS. 2022a. *Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2022*. diakses melalui website https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/OE1KOFBPSnNPY0MvUVRlR25wcytUdz09/da_15/1

BPS. 2022b. *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2022: Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan. Badan Pus Stat., siap terbit.*

Fabiola. 2022. Konsep Blue Economy Di Daerah Pesisir. *J Marit.* 12(2), 52–59.

Fujiani, M. 2022. Faktor Penyebab Kemiskinan Pada Nelayan Pesisir Pantai: Kajian Psikolinguistik. *Translation and Linguistics (Transling)*, *2*(2), 82–85.

Intyas, C. A., Susilo, E., & Indrayani, E. 2022. Modal Sosial dan Kemiskinan Nelayan. Universitas Brawijaya Press.

KKP. 2022a. *Data Volume Produksi Perikanan Tangkap per Provinsi (Ton)*. diakses melalui website https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov#panel-footer-kpda.

KKP. 2022b. *SDM Tangguh dan Bertalenta Global, Kunci Utama Wujudkan Ekonomi Biru.* diakses melalui website https://kkp.go.id/artikel/40981-sdm-tangguh-dan-bertalenta-global-kunci-utama-wujudkan-ekonomi-biru

Pratama. 2020. *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia.* diakses melalui website https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia.

Prayuda, R. 2019. Strategi Indonesia dalam implementasi konsep Blue Economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi Asean. *Indonesian Journal of International Relations*, *3*(2), 46–64.

Silooy, M. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Absolut Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe. *Jurnal Cita Ekonomika*, *11*(1), 79–84.

Wijaya, A. B., & Fauzie, A. 2020. Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*, *2*(2), 96–108.

Zulkifli, Z., Agustrisno, A., & Sitorus, H. 2021. Kemiskinan Nelayan Tradisional Bermula dari Wilayah Penangkapan Ikan. *Perspektif*, *10*(2), 562–568.